



2024

LAPORAN

# APLIKASI SMART DASHBOARD PAJAK DAERAH

**Badan Pendapatan Daerah  
Kota Madiun**

Jl. Soekarno Hatta No. 17 Kota Madiun

agsatu

# Daftar Isi

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1. LATAR BELAKANG.....	1
I.2. MAKSUD.....	2
I.3. TUJUAN.....	2
I.4. SASARAN.....	2
I.5. MANFAAT.....	2
I.6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.....	3
I.7. TAHAPAN PEKERJAAN.....	3
I.8. KELUARAN.....	4
BAB II.....	5
METODOLOGI.....	5
II.1. METODOLOGI SYSTEM.....	5
II.2. FASE METODOLOGI.....	6
BAB III.....	9
HASIL PEKERJAAN.....	9
III.1. DASAR HUKUM.....	9
III.2. PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK.....	9
III.3. INTERFACE APLIKASI.....	11
BAB IV.....	24
PENUTUP.....	24

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Pembuatan Smart Dashboard Pajak Daerah sangat diperlukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun karena memiliki potensi untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah dan memberikan dampak positif yang signifikan. Pembuatan smart dashboard pajak daerah diharapkan dapat membawa berbagai manfaat, termasuk peningkatan pendapatan daerah, efisiensi dalam pengelolaan pajak, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ini akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Smart dashboard dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber termasuk pembayaran pajak, profil subyek pajak/obyek pajak, dan data lainnya. Hal ini memungkinkan pengelola pajak untuk memantau dan mengelola semua informasi ini dengan lebih efisien. Dengan smart dashboard, pengelola pajak dapat melihat data dalam waktu *real-time*. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidakpatuhan pajak dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan. Smart dashboard memberikan alat analitik yang kuat untuk menganalisis data pajak. Ini dapat membantu pengambil keputusan dalam merencanakan strategi perpajakan yang lebih efektif dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Dengan akses yang lebih mudah ke informasi pajak dan pemahaman yang lebih baik tentang pajak yang harus dibayarkan, wajib pajak lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

Smart dashboard dapat membantu mendeteksi pola penipuan pajak dengan cepat. Ini akan mengurangi kerugian keuangan yang disebabkan oleh praktik-praktik penipuan. Pembuatan smart dashboard pajak daerah akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pajak. Dampak yang diharapkan paling signifikan adalah peningkatan pendapatan daerah. Dengan lebih efisien mengelola pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah daerah dapat mengumpulkan lebih banyak dana untuk mendukung program dan proyek

pembangunan.

Dengan akses yang lebih baik ke data dan informasi, pemerintah daerah juga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

## **I.2. MAKSUD**

Maksud dari pekerjaan ini adalah dapat mempermudah dalam pengelolaan pajak daerah yang tepat dan akurat untuk Pemerintah Kota Madiun dan juga mempermudah pengelolaan pelaporan pajak daerah. Untuk menentukan Target Realisasi di dalam Pemerintah Kota Madiun.

## **I.3. TUJUAN**

Tujuan pembuatan aplikasi Smart Dashboard untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam Penentuan Target, Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Tagihan Denda Pajak Daerah.

## **I.4. SASARAN**

Sasaran pembuatan Smart Dashboard Pajak Daerah adalah sebagai berikut ;

- 1) Mengintegrasikan data dari aplikasi yang sudah ada sesuai kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
- 2) Menunjang efektivitas dan efisiensi dalam monitoring pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

## **I.5. MANFAAT**

Manfaat pembuatan Smart Dashboard Pajak Daerah adalah sebagai berikut ;

1. Mempermudah dalam pengelolaan pajak daerah yang tepat dan akurat.
2. Memudahkan pengelolaan dalam pelaporan pajak daerah.
3. Memudahkan dalam penentuan target realisasi yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

## I.6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulai ditandatanganinya SPMK. Keseluruhan tahapan pekerjaan ini akan tersusun dalam jadwal sebagai berikut :

URAIAN KEGIATAN		Minggu ke-			
		1	2	3	4
1	Mendapatkan Daftar Permintaan Pengguna				
2	Analisa kebutuhan system				
3	Penyusunan Desain Pengembangan system				
4	Pemrograman Pengembangan Aplikasi				
5	Prototyping Aplikasi				
6	Instalasi dan Testing Aplikasi				
7	Konfigurasi Akhir dan Perbaikan Aplikasi				
8	Dokumentasi System kepada user				
9	Penyusunan Laporan Hasil Pekerjaan				
10	Penyusunan User Manual Aplikasi				

## I.7. TAHAPAN PEKERJAAN

Tahapan pekerjaan sekaligus menjadi bahan kegiatan ini adalah sebagai berikut ;

1. Koordinasi dan Persiapan

Tenaga ahli melakukan diskusi dan konsultasi dengan pihak user untuk membahas fitur-fitur yang akan digunakan.

2. Pengumpulan Data

Merupakan tahapan pengumpulan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan aplikasi.

3. Penyusunan Program

Tim penyusun mulai merancang dan melengkapi aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis. Adapun tahapan dalam penyusunan aplikasi antara lain analisis, desain, coding, testing, implementasi aplikasi.

4. Pelatihan Operator

Tim implementator melakukan pelatihan kepada operator aplikasi dan mendampingi proses entry data.

**I.8. KELUARAN**

Hasil keluaran dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

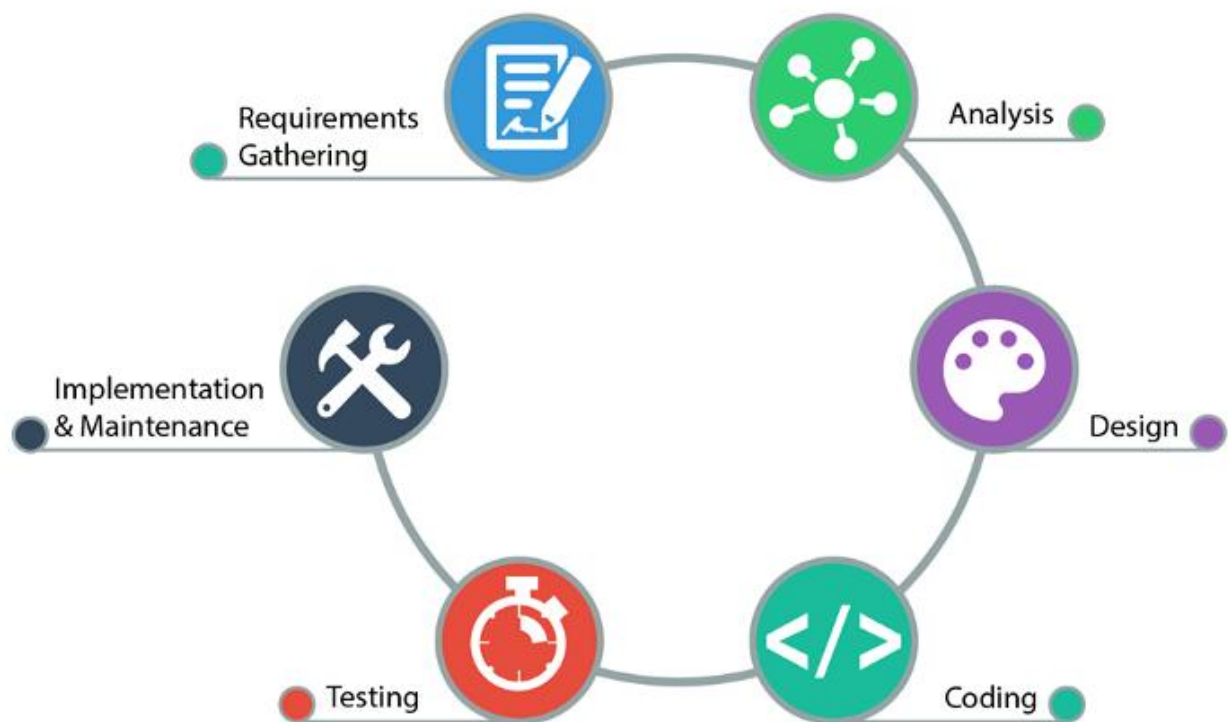
- 1) Perangkat lunak Smart Dashboard Pajak Daerah
- 2) Laporan Hasil Pekerjaan, dibuat sebanyak 3 eksemplar.
- 3) User Manual Aplikasi, dibuat sebanyak 3 eksemplar.
- 4) Flashdisc Master sebanyak 1 unit yang berisi Source Code Aplikasi dan Softfile Laporan Hasil Pekerjaan beserta User Manual.

## BAB II

### METODOLOGI

#### II.1. METODOLOGI SYSTEM

Pembuatan aplikasi Smart Dashboard Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun ini menggunakan metodologi SDLC (System Development Life Cycle) yang sudah terbukti memberikan hasil terbaik dan digunakan secara luas (world wide) dengan pendekatan tahapan pelaksanaan mengikuti Waterfall Concept, seperti gambar berikut ini.



Gambar : Metodologi SDLC

Model *SDLC* mensyaratkan bahwa setiap tahapan hanya dapat dikerjakan apabila tahapan sebelumnya telah selesai dikerjakan dan telah mendapat persetujuan (*approval*) dari pihak pengguna.



## II.2. FASE METODOLOGI

Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing fase dari metodologi yang digunakan :

### 1. *Requirement Gathering Phase*

Adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang berguna menangkap dan menganalisis kebutuhan fungsional dari aplikasi untuk masuk ke tahap desain. Merupakan tahapan awal pengerjaan proyek, berupa pembahasan lengkap mengenai :

- a. Definisi lengkap proyek meliputi apa, siapa, kapan, dan bagaimana proyek akan dilaksanakan.
- b. Kegiatan pendahuluan (*preparation*) berupa mengevaluasi ulang rencana dan strategi disesuaikan dengan kondisi terakhir, dengan tujuan agar pelaksanaan proyek tetap sesuai target.

### 2. *Analysis Phase*

Merupakan tahapan kedua dengan aktivitas antara lain :

- a. Melakukan observasi/peninjauan ke bagian operasional (*end user*) serta bagian Sistem Informasi untuk mendapatkan kondisi operasional yang sebenarnya.
- b. Menginventarisasi keseluruhan konfigurasi sistem informasi yang dijalankan saat ini (*existing system*) berupa seluruh perlengkapan *hardware* maupun *software* yang digunakan.
- c. Mendokumentasikan seluruh rincian kebutuhan dan target yang diharapkan baik dari pengguna maupun dari Fungsi Sistem Informasi (*IT*) sesuai dengan kontrak.
- d. Memperhatikan keterbatasan dan kondisi spesifik setempat sebagai antisipasi meminimalkan kesulitan pada tahap berikutnya.
- e. Menyusun prioritas pekerjaan sesuai dengan tingkat kebutuhan (urgensi) dengan persetujuan Pihak Pemberi Tugas.
- f. Mendefinisikan kebutuhan restrukturisasi dan konversi data pada tingkat *high-level* (strategi migrasi dan konversi data).
- g. Mengkompilasi hasil dan bukti kegiatan pada tahapan analisis untuk diserahkan kepada Pihak Pemberi Tugas untuk disetujui.



### 3. *Design Phase*

Merupakan tahapan kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk memberikan suatu usulan rancang bangun sistem berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah didefinisikan dan disetujui oleh pengguna (Berita Acara Tahap Analisis).

Kegiatan rancang bangun ini meliputi, antara lain :

- a. Desain infrastruktur
- b. Desain *software*
- c. Desain aplikasi
- d. Desain *database*
- e. Desain skenario *recovery* dan *contingency plan*

### 4. *Development / Coding Phase*

Merupakan tahapan realisasi yang bertujuan mewujudkan hasil desain menjadi suatu produk. Kegiatan pada tahap ini meliputi :

- a. Pembuatan spesifikasi program (*form/report/graphic*), *procedure*, menu dan komponen aplikasi lainnya.
- b. Penyediaan data (konversi dan migrasi) untuk kegiatan uji program (*unit test*) maupun untuk uji keterpaduan aplikasi (*integration test*).
- c. Uji program dan uji keterpaduan secara internal oleh Tim Konsultan (Penerima Tugas) bersama Tim *Counterpart* dan Pihak Pemberi Tugas tanpa melibatkan pihak pengguna dulu, termasuk di sini adalah uji migrasi dan konversi data yang sesungguhnya (periode data histori, misal tahun lalu).
- d. *Monitoring* beban sistem saat uji program maupun saat uji keterpaduan dengan mengidentifikasi kemungkinan adanya *bottleneck* atau *heavy load process* yang dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem secara keseluruhan, sebagai bagian dan pekerjaan *Quality Assurer*.
- e. Melengkapi/memperbarui dokumentasi, terutama spesifikasi program sebagai bagian dan serahan dokumentasi sistem nantinya.

### 5. *Testing Phase*

Merupakan proses yang di buat untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kesesuaian hasil sebuah produk atau sistem dengan apa yang sudah di harapkan. Testing dilakukan untuk memastikan atau menjaga mutu produk yang telah dihasilkan dan digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya perbedaan antara produk dengan kondisi yang diinginkan.

6. *Implementation and Maintenance Phase*

Merupakan tahapan kegiatan paling krusial, karena semua produk yang telah dibuat dan telah teruji pada instalasi *upgrade (server development)* akan dioperasikan pada instalasi produksi dan menjamin dalam kelancaran akan produk yang telah dibuat.

## **BAB III**

### **HASIL PEKERJAAN**

#### **III.1. DASAR HUKUM**

Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam kegiatan ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.
- g. Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

#### **III.2. PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK**

##### **III.2.1. Teknologi Yang Digunakan**

Spesifikasi yang dipersyaratkan dalam pekerjaan ini sebagai berikut :

- |                          |   |                                  |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| 1) Model                 | : | Web Based                        |
| 2) Bahasa Pemrograman    | : | PHP dengan Frame Work Laravel    |
| 3) Sistem Operasi Server | : | Multi Platform (Windows / Linux) |
| 4) Database              | : | PostgreSQL                       |

### III.2.2. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang sekaligus menjadi bahan-bahan dalam pengembangan pekerjaan ini adalah sebagai berikut ini :

- a. Integrasi Data Pajak Daerah
- b. Pembuatan Visualisasi Data :

- 1) Target - Realisasi

- Visualisasi data ke dalam grafik dan tabel antara Target APBD, P-APBD, dan Realisasi untuk memudahkan Analisa Data dan kebutuhan evaluasi kerja.

- 2) Kontribusi pajak daerah

- Visualisasi data ke dalam grafik untuk kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memudahkan kebutuhan Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

- 3) Penerimaan pajak daerah

- Visualisasi data grafik penerimaan pajak daerah secara realtime agar mempermudah pembuatan keputusan.

- 4) Pelaporan objek pajak

- Pemetaan Pelaporan pajak daerah untuk kebutuhan pemberian pemberitahuan maupun denda.

- 5) Tunggakan objek pajak

- Pemetaan tunggakan semua pajak daerah untuk pengambilan keputusan.

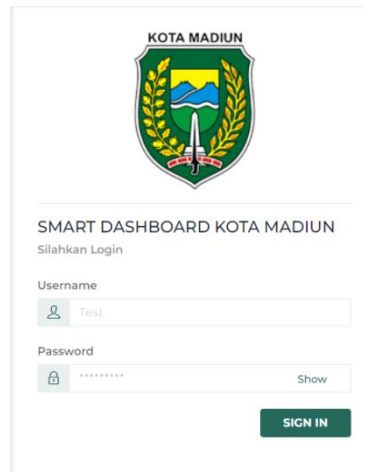
- 6) Tempat dan waktu pembayaran

- Pemetaan dalam hal pembayaran agar memudahkan sosialisasi ke wajib pajak.

- 7) Data objek pajak

- Pemetaan data wajib pajak untuk pengambilan keputusan mengenai tindak lanjut terkait pemeriksaan sehingga dapat di mudahkan dengan data objek yang dipetakan.

### III.3. INTERFACE APLIKASI



Gambar : Tampilan halaman Login Aplikasi

Gambar diatas menampilkan halaman Login aplikasi.

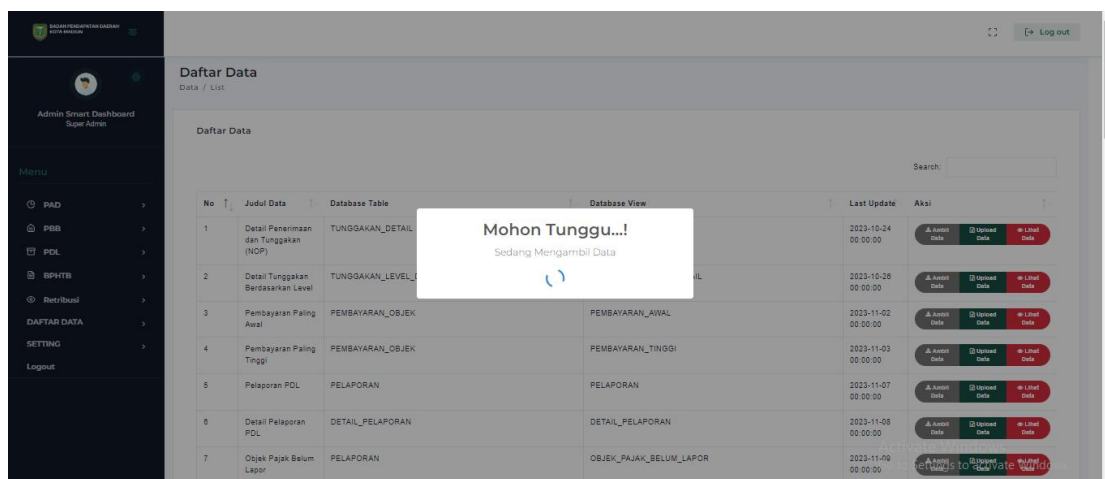
#### III.3.1.Integrasi Data Pajak Daerah

No	Judul Data	Database Table	Database View	Last Update	Aksi
1	Detail Penerimaan dan Tunggalan (NOP)	TUNGGAKAN_DETAIL	TUNGGAKAN_DETAIL	2023-10-24 00:00:00	<a href="#">Ambil Data</a> <a href="#">Upload Data</a> <a href="#">Lihat Data</a>
2	Detail Tunggalan Berdasarkan Level	TUNGGAKAN_LEVEL_DETAIL	TUNGGAKAN_LEVEL_DETAIL	2023-10-26 00:00:00	<a href="#">Ambil Data</a> <a href="#">Upload Data</a> <a href="#">Lihat Data</a>
3	Pembayaran Paling Awal	PEMBAYARAN_OBJEK	PEMBAYARAN_AWAL	2023-11-02 00:00:00	<a href="#">Ambil Data</a> <a href="#">Upload Data</a> <a href="#">Lihat Data</a>
4	Pembayaran Paling Tinggi	PEMBAYARAN_OBJEK	PEMBAYARAN_TINGGI	2023-11-03 00:00:00	<a href="#">Ambil Data</a> <a href="#">Upload Data</a> <a href="#">Lihat Data</a>
5	Pelaporan PDL	PELAPORAN	PELAPORAN	2023-11-07 00:00:00	<a href="#">Ambil Data</a> <a href="#">Upload Data</a> <a href="#">Lihat Data</a>
6	Detail Pelaporan PDL	DETAIL_PELAPORAN	DETAIL_PELAPORAN	2023-11-08 00:00:00	<a href="#">Ambil Data</a> <a href="#">Upload Data</a> <a href="#">Lihat Data</a>

Gambar : Tampilan daftar data

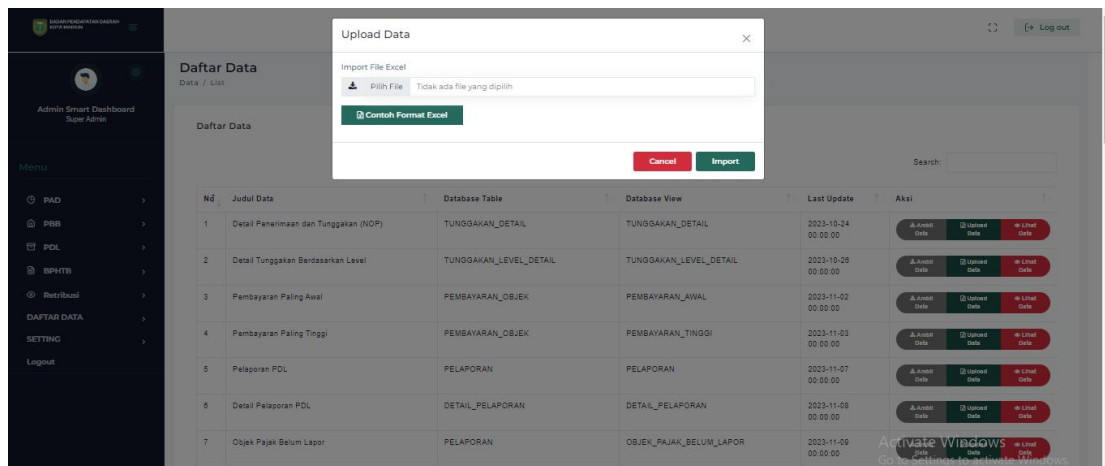
Gambar diatas menampilkan *last update* dari integrasi data dari daftar data dengan aksi ambil data, *upload* data, dan lihat data.

## Laporan Smart Dashboard Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun



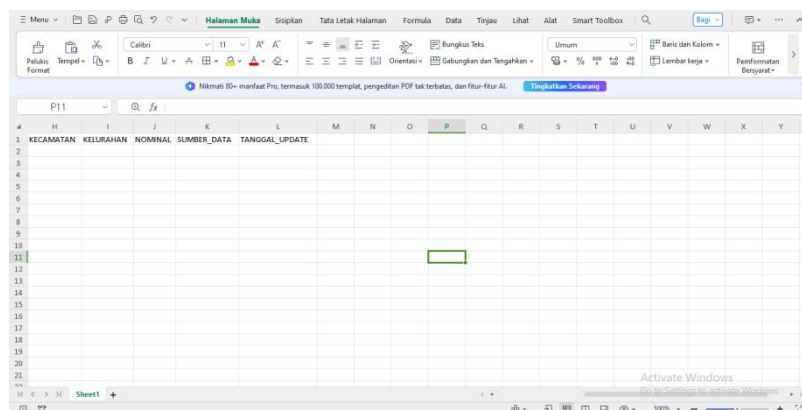
Gambar : Tampilan ambil data pada daftar data

Gambar diatas menampilkan proses *buffering* pengambilan *database* pada fitur Ambil Data yang nantinya apabila data sudah *update* maka akan selesai proses *buffering* tersebut.



Gambar : Tampilan upload data pada daftar data

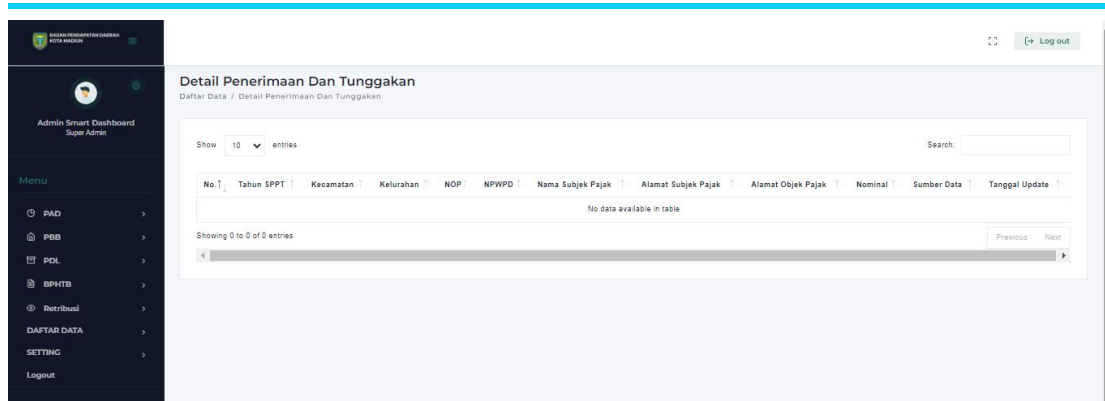
Gambar diatas tampilan *form upload* data ke aplikasi smart dashboard.



Gambar : Tampilan format excel pada fitur upload data

Untuk melakukan upload data maka data harus sesuai dengan format excel yang sudah ditentukan.

## Laporan Smart Dashboard Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

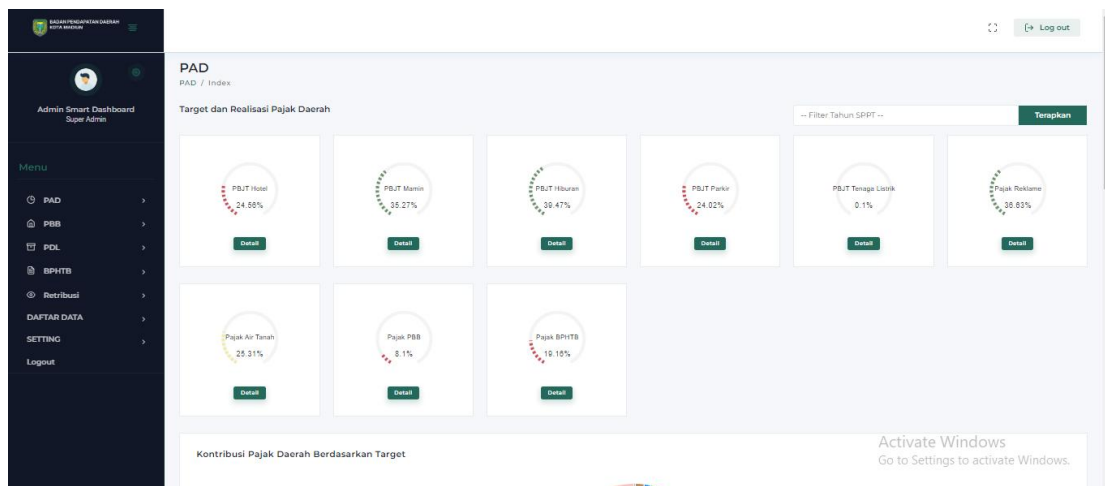


Gambar : Tampilan lihat data pada daftar data

Gambar diatas tampilan fitur detail Lihat Data pada menu Daftar Data.

### III.3.2. Pembuatan Visualisasi Data

#### III.3.2.1. Target Realisasi

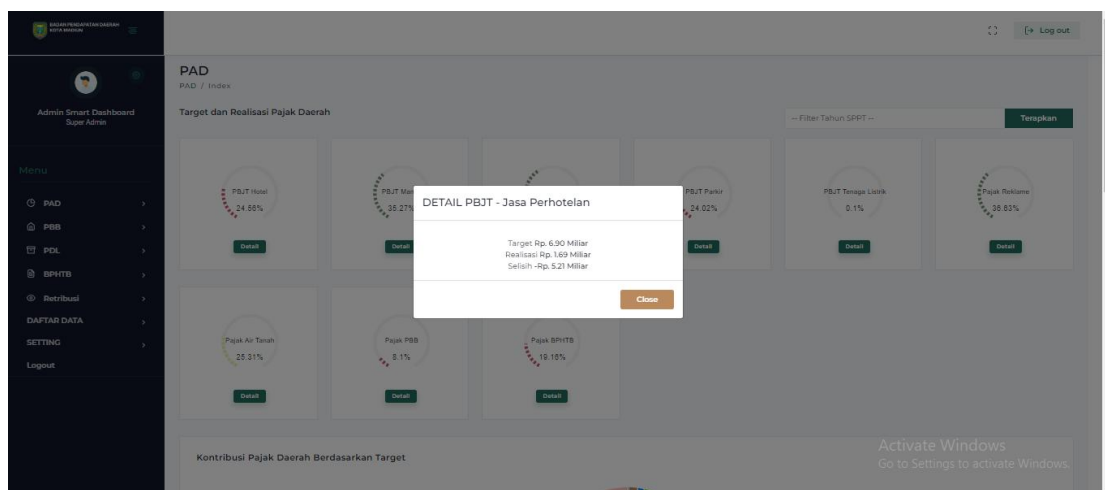


Gambar : Target Realisasi Pajak Daerah

Target realisasi pajak asli daerah merujuk pada jumlah pendapatan pajak pertahun yang diharapkan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dari sumber pajak yang berasal dari wilayah tersebut. Pajak asli daerah biasanya melibatkan berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Pajak Asli Daerah (PAD) meliputi PBJT Hotel, PBJT Mamin, PBJT Hiburan, PBJT Parkir, PBJT Tenaga Listrik, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, pajak PBB, Pajak BPHTB.

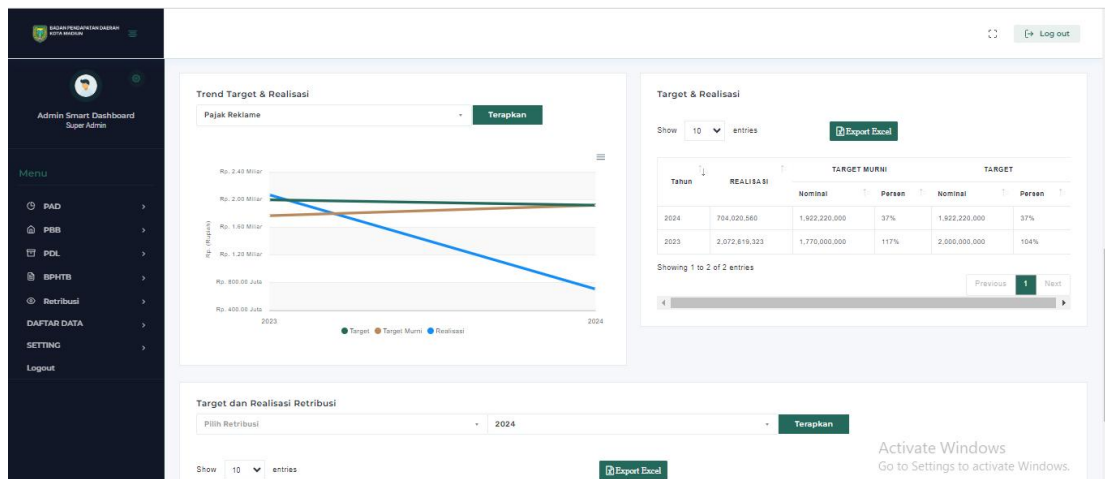


## Laporan Smart Dashboard Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun



Gambar : Detail PBJT

Pada detail PBJT menampilkan informasi tentang Target, Realisasi, dan Selisih.



Gambar : Detail grafik target dan realisasi

Pada gambar diatas merupakan grafik tren target dan realisasi serta target dan realisasi tahun sebelumnya serta tahun berjalan.

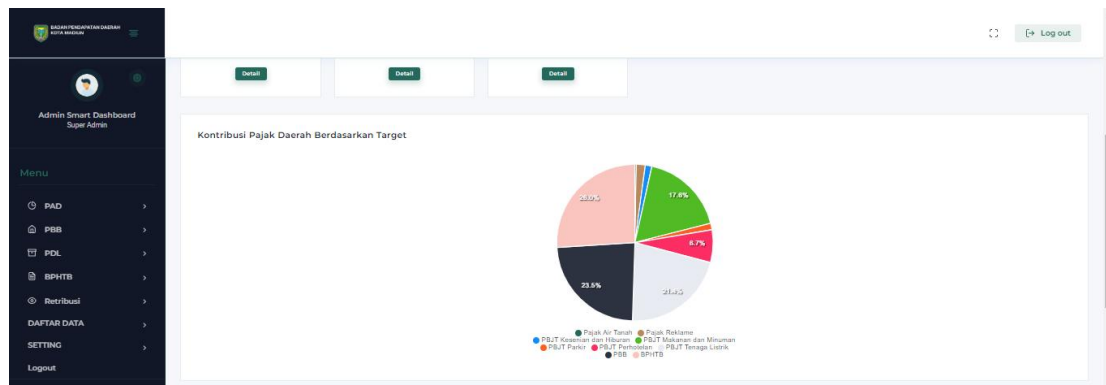
The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the following data:

Tahun	REALISASI	Nominal	Persen	Nominal	Persen
2024	704.020.560	1.922.220.000	37%	1.922.220.000	37%
2023	2.072.619.323	1.770.000.000	117%	2.000.000.000	104%

Gambar : Export Excel target dan realisasi

Tampilan diatas merupakan export excel target dan realisasi pada PAD Smart Dashboard.

### III.3.2.2. Kontribusi Pajak Daerah



Gambar : Kontribusi pajak daerah berdasarkan target

Kontribusi pajak daerah adalah sumbangan yang dibayarkan oleh warga dan badan usaha di suatu daerah kepada pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat lokal. Kontribusi pajak daerah sangat penting untuk mendukung otonomi daerah dan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerimaan pajak daerah juga dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, komposisi kontribusi pajak daerah berdasarkan target meliputi pajak air tanah, pajak reklame, PBJT kesenian dan hiburan, PBJT makanan dan minuman, PBJT parkir, PBJT perhotelan, PBJT tenaga listrik, PBB, BPHTB.

### III.3.2.3. Penerimaan Pajak Daerah

#### a. Penerimaan PBB

Penerimaan PBB

PBB / Penerimaan

2024 Terapkan

Show 10 entries Export Excel

No	Tahun	KECAMATAN DESAKEL	SPPT	TARGET	STTS	SETORAN	%	SPPT	TARGET	%
1	2024	KARTOHARJO	17,419	Rp 5.085.753.818.00	839	Rp 320.449.755.00	6.28 %	16,580	Rp 5.775.303.863.00	94.74 %
2	2024	MANGUHARJO	18,359	Rp 9.838.730.717.00	1,008	Rp 220.151.568.00	2.24 %	15,351	Rp 9.818.870.119.00	97.78 %
3	2024	T.A.M.A.N	28,028	Rp 7.802.893.326.00	1,208	Rp 334.768.019.00	4.24 %	24,230	Rp 7.568.095.207.00	95.78 %
Total Keseluruhan			59,306	Rp 23.937.347.561.00	3,145	Rp 875.389.372.00	3.67 %	56,161	Rp 22.961.948.189.00	96.33 %

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

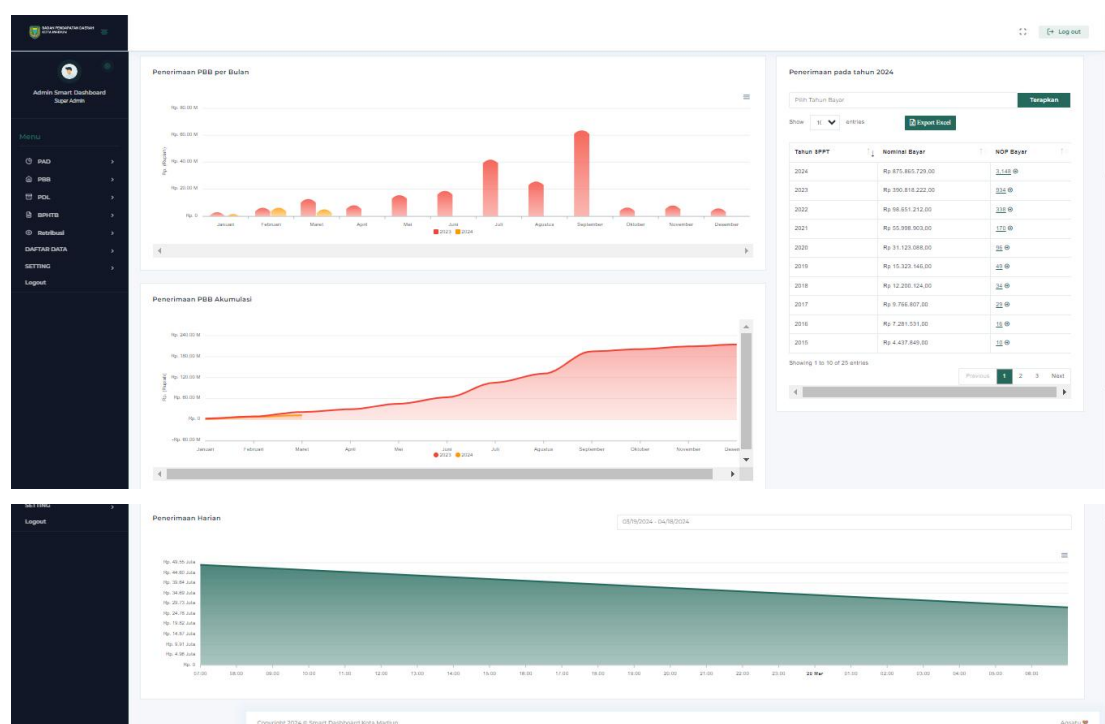
Pilih Bulan (Bisa Multi Bli) Pilih Tahun (Bisa Multi) Pilih Kecamatan Pilih Kelurahan

Gambar : Penerimaan PBB

## Laporan Smart Dashboard Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Tampilan diatas merupakan tabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan ketetapan, realisasi serta sisa, ini dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu, badan usaha, atau lembaga di suatu daerah.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu pilar keuangan bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemungutan dan pengelolaan PBB menjadi hal yang penting dalam menjaga kestabilan keuangan daerah.

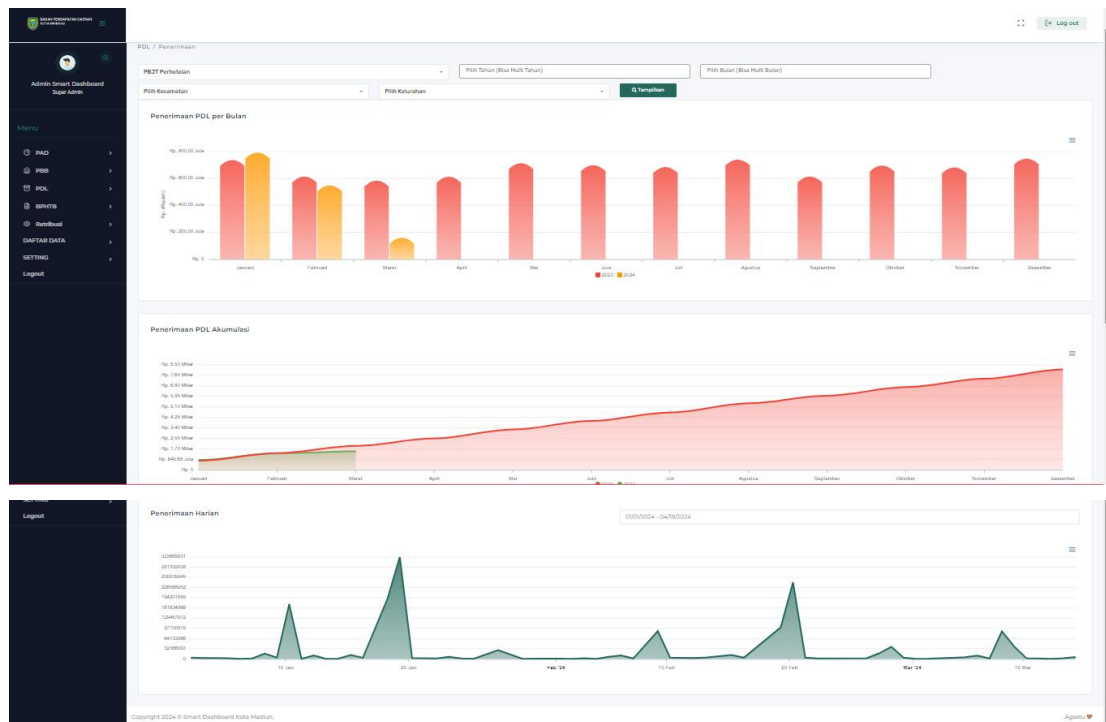


Gambar : Grafik penerimaan PBB

Pada grafik diatas ditampilkan penerimaan PBB pebulan perbandingan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, penerimaan PBB akumulasi perbandingan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, penerimaan harian berdasarkan filter rentang waktu yang dipilih.

## Laporan Smart Dashboard Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

### b. Penerimaan PDL



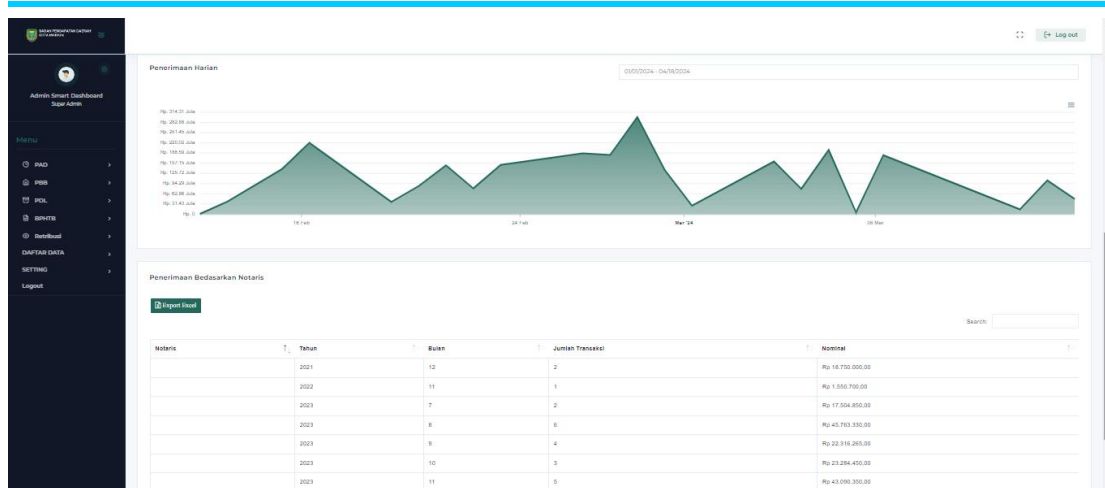
Gambar : Grafik penerimaan PDL

Pada grafik diatas ditampilkan penerimaan pajak daerah lainnya (PDL) perbulan, penerimaan PDL akumulasi serta penerimaan harian, pemerintah daerah juga memperoleh penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah lainnya seperti pajak air tanah, pajak reklame, PBJT kesenian dan hiburan, PBJT makanan dan minuman, PBJT parkir, PBJT perhotelan, PBJT tenaga listrik.

### c. Penerimaan BPHTB



## Laporan Smart Dashboard Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun



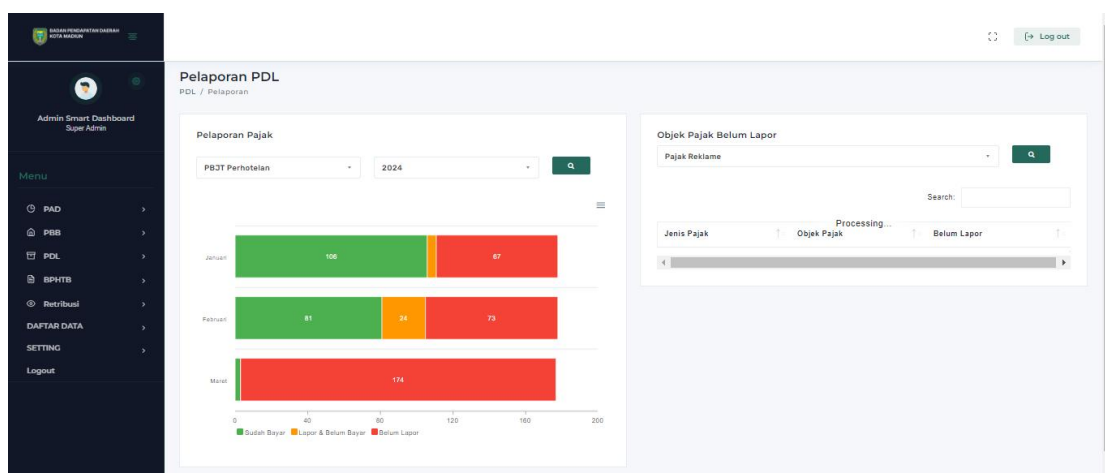
Gambar : Penerimaan BPHTB

Gambar diatas menampilkan grafik penerimaan BPHTB yang meliputi penerimaan BPHTB perbulan, penerimaan BPHTB akumulasi, penerimaan harian, penerimaan berdasarkan notaris.

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah di Indonesia. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik melalui jual beli, hibah, atau pemberian hak dan kewenangan lainnya terkait dengan tanah dan bangunan.

Penerimaan BPHTB menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah, dan pengelolaannya yang efektif dapat membantu mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

### III.3.2.4. Pelaporan Pajak Daerah



Gambar : Pelaporan PDL

Gambar diatas merupakan tampilan grafik dari pelaporan Pajak Daerah Lainnya (PDL)

## Laporan Smart Dashboard Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

yang sudah bayar, lapor dan belum bayar, belum bayar serta tabel objek pajak belum lapor yang meliputi pajak reklame, PBJT perhotelan, PBJT makanan dan minuman, PBJT kesenian dan hiburan, tenaga listrik, pajak air tanah, PBJT parkir, PBJT catering.

### III.3.2.5. Tunggakan Objek Pajak

#### a. Tunggakan PBB

**Tunggakan PBB**  
PBB / Tunggakan

Penerimaan dan Tunggakan (NOP)

Pilih Tahun (Bisa Multi Tahun)  Pilih Kategori Wilayah  Tersapkan

Show 10 entries Export Excel

Wilayah	Tahun SPPT	Berdasarkan NOP				Berdasarkan Nominal					
		NOP Baku	NOP Bayar	NOP Tunggakan	Prosen	NOP Terbit	Penerimaan	Pokok	Denda	Tunggakan	Prosen
Kota Madiun	2024	59.308	3.145	56.161	5.3%	23.837.347.551	875.369.372	875.369.372	0	22.901.948.189	3.87%

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

---

**Tunggakan Berdasarkan Level**

Pilih Kategori Wilayah  Tersapkan

Show 10 entries Export Excel

Wilayah	Ringan (1)	Sedang (2-4)		Berat (>4)	
		Nominal	NOP	Nominal	NOP
Kota Madiun	5.384.440.893	12.811	14.593.745.149	90.081	18.263.683.337

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

---

**Pembayaran Tunggakan**

Pilih Tahun SPPT  Tersapkan

Show 10 entries Export Excel

Tahun Pembayaran	Nominal Bayar	NOP Bayar
2024	Rp 1.507.294.673,00	4.886
2023	Rp 24.478.293.752,00	52.602
2022	Rp 24.655.320.143,00	53.753
2021	Rp 22.964.493.388,00	51.982
2020	Rp 22.417.900.476,00	51.016
2019	Rp 20.979.630.714,00	52.333
2018	Rp 20.784.660.465,00	50.866
2017	Rp 18.605.043.698,00	52.248
2016	Rp 17.937.616.216,00	52.674
2015	Rp 15.253.216.149,00	55.017

Showing 1 to 10 of 45 entries Previous 1 Next

Gambar : Tunggakan PBB

Tampilan di atas tabel yang menunjukkan penerimaan dan tunggakan berdasarkan NOP, penerimaan dan tunggakan berdasarkan nominal, tunggakan berdasarkan level, pembayaran tunggakan.

# Laporan Smart Dashboard Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

## b. Tunggakan PDL

Gambar : Tunggakan PDL

Gambar diatas menampilkan rekapitulasi tunggakan multi tahun serta objek pajak belum dibayar.

## III.3.2.6. Tempat dan Waktu Pembayaran

Gambar : Tempat bayar PBB

Tampilan di atas menunjukan tabel tempat rata-rata transaksi bayar PBB berdasarkan jam bayar serta banyaknya transaksi, pembayaran hanya bisa dilakukan pada Bank Jatim.



### III.3.2.7. Data Objek Pajak

#### a. Objek Pajak PBB

**Objek Pajak PBB**  
PBB / Objek Pajak

Tahun SPPT: 2021 | PBB Kematangan: | PBB Kelengkapan: | Tampilkan

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Tahun SPPT	NOP Terbit	NOP Tepat Waktu	%
2024	9899	3216	0.42%
2023	99179	41006	70.14%
2022	98934	41483	70.35%
2021	98550	38868	68.13%
2020	97234	40068	70.86%
2019	96769	40298	79.79%
2018	96232	40781	81.41%
2017	95862	48145	85.85%
2016	95387	48712	87.83%
2015	94530	49188	89.88%

Showing 1 to 10 of 31 entries

**Pembayaran Paling Awal**

No	Tanggal Pembayaran	NOP	Wajib Pajak	Alamat OP
1	23 Januari 2024	35.77.016.001.004.0039.0	SUKUPEDI	JL. PODANG, NAMBANGAN KIDUL, MANGUHAJUD
2	23 Januari 2024	35.77.036.006.012.0021.0	PRIMISON	JL. MANGSALA MULYA BLK. REJOMULYO, KARTOHARJO
3	23 Januari 2024	35.77.016.001.012.0023.0	INDARTI	JL. BIODADI DS. K. NAMBANGAN KIDUL, MANGUHAJUD
4	23 Januari 2024	35.77.016.001.012.0033.0	BU UMB	JL. UIRP BUNOHARJO, NAMBANGAN KIDUL, MANGUHAJUD
5	23 Januari 2024	35.77.016.002.011.0004.0	INDARTI ISTRI BAMBANG S.	JL. UIRP BUNOHARJO, NAMBANGAN LOR, MANGUHAJUD
6	23 Januari 2024	35.77.016.003.004.0002.0	SUPRIYANTO	JL. UIRP BUNOHARJO, MANGUHAJUD, MANGUHAJUD
7	23 Januari 2024	35.77.016.005.002.0002.0	NIKEN PRAMADHISEWATI	KD PERUM CITRA PURI MALAPRAT, WINGGOD, MANGUHAJUD
8	23 Januari 2024	35.77.016.007.001.0014.0	HARIYANTO	JL. PINGGIR TANGKIS, PATIHAN, MANGUHAJUD
9	23 Januari 2024	35.77.016.007.001.0034.0	SRI RAHAYU, SE	JL. BINGOSARI, PATIHAN, MANGUHAJUD
10	23 Januari 2024	35.77.016.007.002.0024.0	DHAN TRI MARYANTI	JL. KALASAN, PATIHAN, MANGUHAJUD

Showing 1 to 10 of 20 entries

**Pembayaran Paling Tinggi**

Gambar : Kepatuhan wajib pajak dan pembayaran paling awal

- Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel kepatuhan wajib pajak menampilkan tahun SPPT, NOP yang terbit, NOP yang tepat waktu, serta prosentase kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

- Pembayaran Paling Awal

Pada tabel pembayaran paling awal menampilkan tanggal pembayaran, NOP, wajib pajak, serta alamat objek pajak.

- Pembayaran Paling Tinggi

**Pembayaran Paling Tinggi**

No	NOP	Wajib Pajak	Alamat OP	Nominal
1	35.77.030.002.007.0008.0	PT GARREFOUR INDONESIA CAB MEN	J. LETJEN S. PRABMAN, DRO-DRO DMBD, KARTOHARJO	Rp 129.185.448,00
2	35.77.030.008.015.0041.0	PT PG RAJAWALIPU REJOGANGUNG	KEL. TAWANGREJO, TAWANGREJO, KARTOHARJO	Rp 112.599.760,00
3	35.77.030.008.015.0003.0	WAN HARITO	J. BASUKI ROHMAT, TAWANGREJO, KARTOHARJO	Rp 52.102.910,00
4	35.77.030.008.004.0026.0	KANTOR PENGADAAN	J. COKROAMNOTO, KEJURON, T A M A N	Rp 20.418.948,00
5	35.77.020.003.004.0103.0	TRIPIHENA RUSTANTH	J. SOEKARNO WATTA, DEBANGAN, T A M A N	Rp 17.796.830,00
6	35.77.020.005.002.0107.0	WIYONO ALIAS CIE KIM SIONG	J. CITANDU, PANDEAN, T A M A N	Rp 15.579.288,00
7	35.77.030.001.001.0023.0	SIANK TISBUNGAN NISARA, PT	J. DR. SUTOMO, KARTOHARJO, KARTOHARJO	Rp 15.135.672,00
8	35.77.030.001.011.0012.0	TRIPIHENA RUSTANTH	J. DR. SUTOMO, KARTOHARJO, KARTOHARJO	Rp 14.420.103,00
9	35.77.030.003.008.0024.0	PT TASPENPERSBERG	J. PANJANTAN, PANDEAN, T A M A N	Rp 14.273.670,00
10	35.77.030.001.001.0003.0	BPO JATIM CAB MADIUN (CAB)	J. JAWA, KARTOHARJO, KARTOHARJO	Rp 14.208.540,00

Showing 1 to 10 of 20 entries

**Objek Pajak per Wilayah**

Gambar : Pembayaran paling tinggi objek pajak PBB

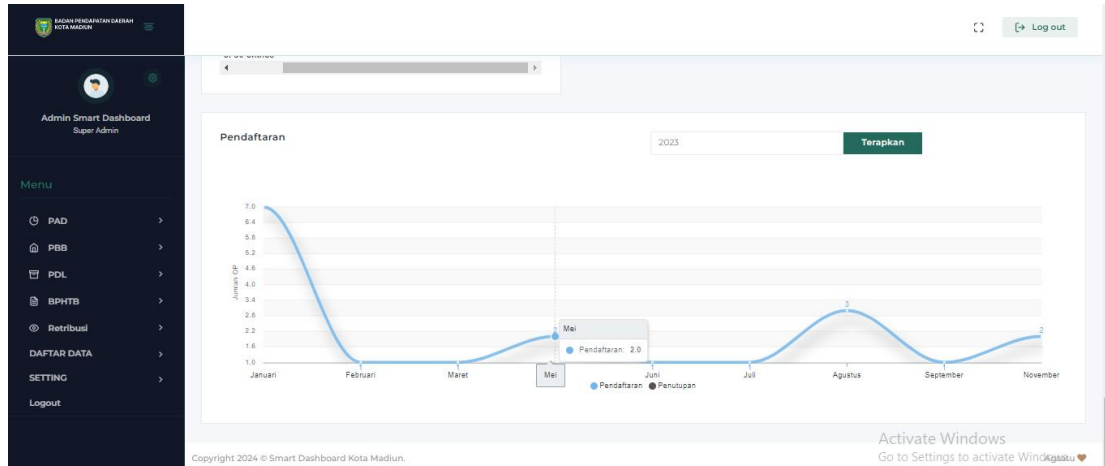
Pada tabel pembayaran paling tinggi menampilkan NOP, nama wajib pajak, alamat objek pajak, nominal pembayaran pajak PBB.



## Laporan Smart Dashboard Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

tenaga listrik, PBJT parkir, pajak air tanah, serta pilihan tahun pembayaran pajak. Pada objek pajak aktif terdapat jenis pajak, NPWPD, NOP, objek pajak, alamat objek pajak serta terdapat fitur pencarian.

### ● Pendaftaran



Gambar : Tampilan Pendaftaran Objek Pajak PDL

Gambar diatas menampilkan grafik pendaftaran jumlah objek pajak dari bulan ke bulan berdasarkan tahun tertentu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian laporan kegiatan Pembuatan aplikasi Smart Dashboard Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Dengan komitmen yang penuh dan pengalaman kami di bidang teknologi informasi, pihak kami secara konsisten akan melakukan pengembangan terhadap sistem yang ada sehingga selalu *up to date* terhadap kebutuhan.